

EFEKTIVITAS DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI MASA PANDEMI DAN ENDEMI COVID 19

Gede Adi Yuniarta¹, Gede Putu Wirata²

¹Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,

²Balitbang Inovda Buleleng

Email: gdadi_ak@yahoo.co.id, wiratagd@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) kondisi pekerja di Kabupaten Buleleng, (2) kondisi tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng, dan (3) tingkat efektivitas dan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada sektor ketenagakerjaan di masa pandemi dan endemi Covid 19. Lokasi kegiatan pengkajian adalah di wilayah Kabupaten Buleleng. Responden adalah pekerja yang terdampak Covid 19. Kuesioner diberikan kepada responden yang menerima program kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng terkait penanganan Covid 19 sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020. Total penerima program adalah sebanyak 2.757 orang. Penentuan sampel menggunakan metode *Slovin* dengan hasil perhitungan penentuan sampel sebanyak 349 responden.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat ditarik tiga kesimpulan yakni kondisi pekerja dan pengangguran di Kabupaten Buleleng sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah dengan jumlah paling banyak berpendidikan SD ke bawah. Tingkat efektivitas kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja di masa pandemi dan endemi Covid 19 adalah efektif. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian dan FGD adalah profil tenaga kerja dan pengangguran sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah dengan jumlah paling banyak berpendidikan SD ke bawah. Serta kondisi sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali sangat rentan akan berbagai peristiwa sehingga perlu penyiapan lapangan kerja, kebijakan, strategi rasional dan relevan dengan kondisi tersebut seperti: (a) Optimalisasi potensi lokal Kabupaten Buleleng untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja lokal. Menumbuhkan keyakinan potensial sumber ekonomi di luar pariwisata seperti pertanian, peternakan, perikanan dan potensi lainnya. Mengurangi ketergantungan tenaga kerja pada sektor pariwisata serta mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal. (b) Pemerintah melalui dinas terkait perlu meningkatkan kegiatan, kebijakan dan strategi untuk dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dengan lebih mengutamakan penggalan potensi daerah. (c) Mengintensifkan potensi

UMKM di Buleleng untuk tenaga kerja lokal supaya potensi ketenagakerjaan di sektor ini tidak banyak direbut oleh tenaga kerja luar Buleleng. Rekomendasi kedua adalah berbagai kegiatan/kebijakan/ strategi yang dilakukan dinas ketenagakerjaan sudah efektif namun perlu ditingkatkan ke arah sangat efektif. Perlu dijadikan bahan kajian untuk meningkatkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang. Rekomendasi ketiga adalah kebijakan terkait jaminan Ketenagakerjaan (TK dan kesehatan) sebenarnya sudah efektif hanya perlu penyempurnaan regulasi untuk memaksimalkan peran di masa yang akan datang. Rekomendasi keempat adalah komunikasi efektif dimasa ketidakpastian sangat diperlukan, disarankan untuk menyiapkan/menyempurnakan pola komunikasi efektif yang dapat menjembatani berbagai informasi yang dibutuhkan berbagai pihak baik pemerintah, pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat umum. Ketepatan informasi yang dapat diserap publik akan dapat meredam dan meminimalkan dampak negatif dari kondisi ketidakpastian. Rekomendasi kelima adalah pendataan ketenagakerjaan supaya valid, masing-masing pihak terkait bisa menggunakan data awal dari sumber yang sama. Sinergi dari berbagai pihak khususnya Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Institusi lainnya harus dioptimalkan dengan keterkaitan Bersama Badan Pusat Statistik. Pemanfaatan kemajuan teknologi khusus sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghasilkan kependudukan khusus data ketenagakerjaan

Kata kunci : efektivitas, Tenaga kerja, Kebijakan, Strategi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze: (1) the working conditions in Buleleng Regency, (2) the unemployment rate in Buleleng Regency, and (3) the level of effectiveness and policy strategies of the Buleleng Regency government in the employment sector during the Covid 19 pandemic and endemic. The assessment activities took place in the Buleleng district. Respondents were Covid 19 affected workers. Respondents who received an activity program from the Buleleng Regency Manpower Office related to handling Covid 19 from 2019 to 2020 were given questionnaires. There were a total of 2,757 program participants. The Slovin method was used to determine the sample, and the results of the calculation of the determination of the sample included 349 respondents.

Three conclusions can be drawn from the studies conducted, namely the condition of workers and unemployment in Buleleng Regency, the majority of whom have a high school education or less, with the majority having an elementary school education or less. During the Covid 19 pandemic and endemic, the effectiveness of policies and strategies implemented by the Buleleng Regency Government through the Manpower Office is effective. Recommendations derived from the study and FGDs include the profile of the workforce and the unemployed, the majority of whom have a high school education or less, with the highest

number having an elementary education or less. And because the tourism sector, which is the mainstay of Bali, is extremely vulnerable to various events, it is necessary to prepare employment opportunities, policies, and rational and relevant strategies for these circumstances, such as: (a) maximizing the local potential of Buleleng Regency to create employment opportunities for local workers. Establishing confidence in potential economic resources other than tourism, including agriculture, animal husbandry, and fishing, among others. Reducing the workforce's reliance on the tourism industry and maximizing the potential of local employees. b) The government, through the appropriate agencies, must enhance its activities, policies, and strategies in order to foster an entrepreneurial spirit by prioritizing regional potential exploration. c) Increasing the potential of MSMEs in Buleleng for local workers, so that the employment opportunities in this sector are not exploited by a large number of workers from outside Buleleng. The second recommendation is that the Ministry of Manpower's activities/policies/ strategies have been effective but must be enhanced to become highly effective. It must be used as study material to improve future policies and strategies. The third recommendation is that policies pertaining to employment insurance (TK and health) have actually been effective, requiring only future regulatory enhancements to maximize their role. The fourth recommendation is that effective communication in times of uncertainty is crucial, and it is recommended to prepare/perfect effective communication patterns that can bridge diverse information required by various parties, including the government, employers, employees, and the general public. The public's ability to assimilate accurate information will reduce and mitigate the negative effects of uncertain conditions. The fifth recommendation is to ensure the validity of labor data collection by allowing all parties to use data from the same source. The link with the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik) must maximize the synergy between various parties, particularly the Department of Manpower (Dinas Tenaga Kerja), the Civil Registry, and other institutions. Special technological advances must be utilized in integrated information systems in order to collect specialized population employment data.

Keywords : effectiveness, workforce, policy, strategy

PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia masih berjuang menghadapi pandemi Covid 19. Dan hampir semua sektor terdampak mulai kesehatan, sosial, ekonomi termasuk di dalamnya keberlangsungan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Di bidang ketenagakerjaan ada beberapa masalah yang muncul akibat wabah Covid 19. Pertama saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana sebagian perusahaan tidak boleh beroperasi. Sebagai akibatnya maka perusahaan akan merumahkan pekerjanya atau menerapkan bekerja dari rumah (WFH). Bagi perusahaan yang menerapkan WFH tentu saja akan tetap membayar upah pekerjanya walaupun pekerja tidak datang ke tempat kerja, sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dimana setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Namun bagi perusahaan yang merumahkan pekerjanya bisa saja hanya membayar gaji pokoknya saja atau memotong sebagian upah pekerja sebagai hasil kesepakatan para pihak. Hal ini tergantung dari kondisi keuangan perusahaan. Kedua, berlaku asas tidak bekerja tidak dibayar atau *no work no pay* sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, pembayaran upah. Pemotongan upah karyawan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kondisi-kondisi tertentu. Dalam masa pandemi Covid 19 banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan upah karyawan tidak berdasarkan hukum dengan alasan merugi akibatnya menimbulkan banyak sekali perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak. Keempat, sebagai dampak Covid 19 bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Walaupun pada dasarnya perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap buruh/karyawannya secara sewenang-wenang dalam kondisi apapun termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Meningkatnya angka pengangguran memang telah terjadi sejak tahun 2019. Dan berbagai kegiatan telah dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Baik itu dengan memberikan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan kerja sehingga nantinya diharapkan mampu untuk menciptakan usaha mandiri.

Pandemi Covid 19 yang merupakan wabah global memberikan dampak buruk pada berbagai bidang baik kesehatan, perekonomian, pendidikan dan tidak keterkecuali permasalahan ketenagakerjaan. Peristiwa ini tidak dapat membendung lonjakan pengangguran. Pemerintah sebagai pihak utama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi ini. Berbagai upaya telah dilakukan pihak pemerintah yang tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pandemi Covid 19. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga sudah melakukan berbagai upaya maksimal menanggulangi kondisi ini, tidak terkecuali di sektor ketenagakerjaan. Berbagai upaya pemerintah di sektor ketenagakerjaan yang telah dilakukan perlu dilakukan evaluasi guna lebih menyempurnakan kebijakan dan strategi

di masa yang akan datang. Sehingga diperlukan kajian terkait efektivitas dan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi pada sektor ketenagakerjaan di masa pandemi Covid 19.

Ada tiga tujuan kajian ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisis: (1) kondisi pekerja di Kabupaten Buleleng, (2) kondisi tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng, dan (3) tingkat efektivitas dan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada sektor ketenagakerjaan di masa pandemi dan endemi Covid 19. Lokasi kegiatan pengkajian adalah di wilayah Kabupaten Buleleng yang difokuskan pada pekerja terdampak Covid 19. Data primer dari kajian ini diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner diberikan langsung ke responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner diberikan kepada responden yang menerima program kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng terkait penanganan Covid 19 sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020. Total penerima program adalah sebanyak 2.757 orang. Penentuan sample menggunakan metode *Slovin* dengan hasil perhitungan penentuan sampel sebanyak 349 responden. Kuesioner disebar dengan menggunakan media komunikasi dan responden mengisi melalui *Google form* yang telah disiapkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data terkait ketenagakerjaan yang bersumber dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Kegiatan penyempurnaan hasil kajian juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan hasil dari persepsi responden.

METODE

Lokasi kegiatan pengkajian adalah di Wilayah Kabupaten Buleleng yang difokuskan pada pekerja terdampak Covid 19. Pelaksanaan kegiatan untuk tahap persiapan dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2022, sedangkan kegiatan pengkajian adalah dari Bulan April sampai dengan bulan Juli 2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya terdiri atas data primer dan sekunder. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak tersedia dalam bentuk kompilasi atau dokumen, harus melalui narasumber atau responden (Sarwono, 2006). Data primer diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner diberikan langsung ke responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner diberikan kepada responden yang menerima program kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng terkait penanganan Covid 19 sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020. Total penerima program adalah sebanyak 2.757 orang. Penentuan sample menggunakan metode dengan hasil perhitungan penentuan sampel sebanyak 349 responden. Kuesioner disebar dengan menggunakan media komunikasi dan responden mengisi melalui *Google form* yang telah disiapkan. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan hasil dari persepsi responden. Namun untuk mengetahui persepsi responden terhadap efektivitas dan strategi

kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja adalah dengan menentukan indeks efektivitas untuk menentukan tingkat efektivitas kebijakan yang telah dilakukan. Data persepsi responden terhadap efektivitas dibagi menjadi 4 dimensi yaitu : bukti langsung (*tangible*), keandalan (*reability*), daya tanggap (*responsiveness*), dan jaminan (*assurance*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pekerja Di Kabupaten Buleleng

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) mempunyai pekerjaan, baik yang memang melakukan aktifitas bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena satu dan lain hal seperti sedang cuti, menunggu panen, atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja profesional seperti penyanyi, dukun, dalang). Selain itu, termasuk pula ke dalam kategori angkatan kerja yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan (pengangguran). Data yang diperlukan untuk kajian ini sebagian besar bersumber dari Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng tahun 2019 dan 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Bali penduduk usia kerjanya cukup tinggi di Bali. Lebih dari 514.000 penduduk usia kerja berasal dari Kabupaten Buleleng atau sekitar 15 persen dari seluruh penduduk usia kerja di Bali. Artinya bahwa banyak penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang memiliki potensi sebagai pekerja produktif dari penduduk Kabupaten Buleleng.

Bila dilihat dari angka tersebut maka kondisi penduduk usia kerja di Buleleng sangat tinggi, karena dengan kondisi penduduk usia kerja yang tinggi tersebut dapat menggerakkan ekonomi Buleleng, terutama dengan kondisi ekonomi Buleleng dan Bali yang mulai tumbuh. Pada tahun 2019, terdapat sejumlah 497.484 penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Buleleng, dimana 245.437 orang atau 49,34 persen di antaranya merupakan penduduk laki-laki dan 50,66 persen sisanya merupakan penduduk perempuan yakni sejumlah 252.047 orang. Pada tahun 2020, terdapat sejumlah 509.835 penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Buleleng, dimana 251.751 orang atau 49,38 persen di antaranya merupakan penduduk laki-laki dan 50,62 persen sisanya merupakan penduduk perempuan yakni sejumlah 258.084 orang. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng bertambah sekitar lima ribu orang dari tahun 2018 ke tahun 2019. Jumlah penduduk usia kerja di seluruh Provinsi Bali mencapai 3.338.767 orang pada tahun 2019. Artinya, sekitar 14,90 persen tenaga kerja di Provinsi Bali berada di Kabupaten Buleleng. Begitu juga tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng bertambah sekitar dua belas ribu orang.

Jumlah penduduk usia kerja di seluruh Provinsi Bali mencapai 3.455.127 orang pada tahun 2020. Artinya, sekitar 14,76 persen tenaga kerja di Provinsi Bali berada di Kabupaten Buleleng. Tahun

2021 terjadi juga kenaikan penduduk usia kerja menjadi 3.509.900 dimana 14,6 persen penduduknya ada di Kabupaten Buleleng. Jika dibandingkan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng hasil Proyeksi Penduduk sejumlah 664 ribu jiwa, maka dapat dikatakan bahwa sekitar 76,78 persen penduduk berada pada kategori usia kerja. Peningkatan persentase penduduk usia kerja terhadap total penduduk mengalami peningkatan dalam dua periode terakhir. Pada periode 2019-2020 terjadi peningkatan persentase penduduk usia kerja sebesar 1,47 poin persen sedangkan pada periode sebelumnya yakni tahun 2018-2019 hanya sebesar 0,42 persen poin. Hal ini dimungkinkan karena adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada sektor pariwisata di Bali, khususnya wilayah Bali bagian selatan. Dampak buruk ini juga berimbas pada kembalinya pekerja asal Kabupaten Buleleng dari perantauan di Bali selatan ke kampung halaman. Hal ini memicu peningkatan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020.

Menurut aktifitas yang dilakukannya, penduduk usia kerja dapat digolongkan menjadi dua kategori yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Diantara penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019, sebanyak 76,87 persen termasuk angkatan kerja, sedangkan 23,13 persen sisanya termasuk pada kategori bukan angkatan kerja. Pada tahun 2020, sebanyak 75,07 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng masuk pada kategori angkatan kerja, sedangkan 24,93 persen sisanya termasuk pada kategori bukan angkatan kerja. Untuk tahun 2021 sebanyak 376.000 atau 73 persen termasuk angkatan kerja, sedangkan 138.000 atau 17 persen sisanya termasuk pada kategori bukan angkatan kerja.

Persentase penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja diantara penduduk usia kerja menghasilkan suatu indikator yang biasa disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator tersebut merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang seringkali digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja di suatu daerah. Indikator TPAK dapat menggambarkan besaran penduduk yang siap kerja di suatu daerah. TPAK Kabupaten Buleleng tahun 2019 sebesar 69,67 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng, 70 orang tersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi. TPAK Kabupaten Buleleng tahun 2020 sebesar 75,07 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng, 75 orang tersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi. TPAK Kabupaten Buleleng tahun 2021 sebesar 73,08 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng, 73 orang tersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi. Artinya bahwa dari 100 penduduk Buleleng di usia kerja 73 orang penduduk Buleleng sudah siap untuk bekerja. Dengan potensi besarnya usia kerja tersebut akan dapat menggerakkan perekonomian Buleleng. Di Buleleng sekitar 94,41 persen dari 376.000 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 tergolong sebagai penduduk yang bekerja. Tentu saja untuk

mengevaluasi kemampuan pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja, terdapat suatu indikator yang dapat dijadikan acuan, yakni rasio antara penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja atau yang biasa disebut dengan *Employment-to-Population Ratio (EPR)*. Indikator ini bersama dengan indikator tingkat pengangguran dapat menjadi sebuah kajian tentang posisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah.

Pada tahun 2019, terdapat sejumlah 497.484 penduduk berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Buleleng, dimana 245.437 orang atau 49,34 persen diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan 50,66 persen sisanya merupakan penduduk perempuan yakni sejumlah 252.047 orang. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng bertambah sekitar lima ribu orang dari tahun 2018 hingga 2019. Jumlah penduduk usia kerja di seluruh Provinsi Bali mencapai 3.338.767 orang pada tahun 2019. Artinya, sekitar 14,90 persen tenaga kerja di Provinsi Bali berada di Kabupaten Buleleng.

Dibandingkan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 yang diproyeksikan sejumlah 660,6 ribu jiwa, maka dapat dikatakan bahwa sekitar 75,31 persen penduduk berada pada kategori usia kerja. Persentase penduduk usia kerja pada tahun 2018 ini meningkat sebesar 0,42 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018, dimana penduduk usia kerja sebesar 74,89 persen dari jumlah penduduk. Laju peningkatan persentase penduduk usia kerja tahun 2018-2019 tidak sebesar pada periode sebelumnya, yakni periode tahun 2017- 2018 yang meningkat sebesar 0,47 persen poin.

Pada tahun 2019 ini persentase penduduk menganggur berjenis kelamin laki-laki meningkat cukup tajam, dari 71,14 persen pada tahun 2018 menjadi 79,96 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 proporsi angkatan kerja perempuan yang bekerja tidak terpaut jauh dibanding laki-laki. Sebanyak 52,60 persen diantara penduduk yang bekerja berjenis kelamin laki-laki, dan 47,40 persen sisanya adalah perempuan. Sedangkan pada kelompok penganggur, sebanyak 64,19 persen diantaranya adalah laki- laki dan 35,81 persen perempuan. Pada tahun 2019 tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah di Kabupaten Buleleng justru dapat terserap baik pada lapangan pekerjaan yang ada. Di sisi lain, hal ini merupakan suatu sinyal bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng, terutama yang berpendidikan tinggi, masih membutuhkan banyak lapangan pekerjaan ataupun keterampilan untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, persentase penduduk bekerja yang berlatar pendidikan Diploma dan Universitas mengalami peningkatan, dari 7,50 pada tahun 2018 menjadi 11,73 persen pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 bukanlah disumbang oleh pangangguran dari kalangan. Pada tahun 2020 tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah di Kabupaten Buleleng dapat terserap baik pada lapangan pekerjaan yang ada. Namun demikian, bila dibandingkan

dengan kondisi tahun sebelumnya, persentase penduduk bekerja yang berlatar pendidikan SD kebawah mengalami penurunan, dari 49,80 persen pada tahun 2019 menjadi 45,45 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk bekerja yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK sederajat mengalami peningkatan pada tahun 2020. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa penduduk yang kembali ke kampung halaman pada masa pandemi adalah para pekerja pariwisata yang pada umumnya berpendidikan SMA/SMK sederajat dan melanjutkan kursus kepariwisataan.

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebagian besar bergerak pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yakni sebesar 31,66 persen. Persentase penduduk bekerja pada sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019, dimana pada tahun 2018 masih terdapat 37,02 persen penduduk bekerja yang bergelut di sektor ini. Penurunan ini memberikan sedikit gambaran terkait dengan peningkatan pengangguran di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019. Pergerakan data ini menunjukkan bahwa goncangan yang terjadi pada sektor utama mata pencaharian masyarakat dapat menimbulkan efek peningkatan indikator (pengangguran) yang cukup signifikan. Sektor terbanyak kedua setelahnya adalah lapangan pekerjaan bidang perdagangan besar dan eceran yakni sebanyak 18,48 persen. Sektor ini pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 20,12 persen. Pada posisi ketiga, sektor Industri pengolahan tampaknya tidak mengalami hal yang serupa. Persentase penduduk bekerja yang menggeluti sektor industri pengolahan meningkat dari 9,58 persen pada tahun 2018, menjadi 11,62 persen pada tahun 2019. Selain Kabupaten Buleleng memiliki potensi lahan pertanian dan laut, sektor pariwisata juga merupakan sektor andalan sehingga kegiatan ekonomi yang menunjang kedua potensi ini cukup berkembang. Persentase penduduk bekerja pada sektor penunjang pariwisata yakni sektor akomodasi dan makan minum juga mengalami penurunan, dari 8,88 persen pada tahun 2018 menjadi 7,16 persen pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Buleleng bergerak pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yakni sebesar 34,81 persen 31,66 persen. Persentase penduduk bekerja pada sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 terdapat 31,66 persen penduduk bekerja yang bergelut di sektor ini. Sektor terbanyak kedua setelahnya adalah lapangan pekerjaan bidang perdagangan besar dan eceran yakni sebanyak 20,76 persen. Sektor ini pun mengalami peningkatan di masa pandemi dari 18,48 pada tahun 2019. Pandemi yang berdampak pada sektor pariwisata juga dialami di Kabupaten Buleleng. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya persentase penduduk bekerja pada lapangan usaha pendukung pariwisata yakni sektor akomodasi dan makan minum juga sektor industri pengolahan. Sektor Industri mengalami penurunan dari 11,62 persen pada tahun 2019 menjadi 10,17 persen

pada tahun 2020 sedangkan sektor sektor akomodasi dan makan minum mengalami penurunan dari 7,16 persen pada tahun 2019 menjadi 6,05 pada tahun 2020. Persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha konstruksi masih mengalami peningkatan pada masa pandemi, yakni dari 6,63 persen pada tahun 2019 menjadi 2020.

Dalam hal batasan jam kerja, BPS membagi pekerja menjadi dua kelompok, yakni pekerja tidak penuh (setengah penganggur) yang bekerja selama kurang dari 35 jam dalam seminggu, dan pekerja penuh yang bekerja selama 35 jam atau lebih selama seminggu. Pada tahun 2019, sebanyak 67,00 persen dari pekerja di Kabupaten Buleleng tergolong pada pekerja penuh (*full time worker*) sedangkan 33,00 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (setengah penganggur). Sedangkan pada tahun 2020, hanya sebanyak 45,82 persen dari pekerja di Kabupaten Buleleng yang masuk sebagai pekerja penuh, sedangkan 54,18 persen lainnya termasuk kategori pekerja tidak penuh karena bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Artinya bahwa penduduk Buleleng banyak yang memiliki pekerjaan atau bekerja yang tentu saja mendapatkan penghasilan. Dengan besarnya jumlah penduduk Buleleng tersebut maka potensi untuk mengembangkan Buleleng sangat tinggi. Namun demikian banyaknya penduduk Buleleng bekerja di sektor informal. Karena itu perlu sinergisitas dalam pemberdayaan dana pemerintah dan potensi pekerja produktif di Buleleng untuk menggerakkan ekonomi Buleleng. Dalam menghadapi pasca pandemi Covid 19 saat ini, menunggu pekerjaan saja tidak akan cukup karena lapangan pekerjaan yang ada tidak akan bisa menampung seluruh tenaga kerja. Oleh karena itu peran pemerintah sangat besar dalam mengembangkan potensi masyarakat ini, diantaranya dengan memberikan berbagai pelatihan kerja, memberikan kemudahan dalam pinjaman modal usaha, mempermudah izin membuka usaha, dan lain sebagainya. Selain itu dana-dana pemerintah dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat yang padat karya sehingga jumlah penduduk yang bekerja akan semakin besar. Misalnya adalah pelibatan masyarakat sekitar tempat kegiatan baik dari sisi penduduknya dan juga dari sisi produk yang dihasilkannya sehingga akan ada *multiplayer effect* bagi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi sekitar yang juga akan dapat menggerakkan sektor ekonomi yang lain sehingga penduduk bekerja di Buleleng semakin meningkat.

Saat ini sektor informal telah menjadi penopang utama kegiatan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Bahkan pasca pandemi Covid 19 banyak pekerja yang bekerja pada pekerjaan yang merupakan kategori pekerja informal. Hal ini karena banyak pekerja yang sudah tidak bekerja lagi sebagai pekerja migran. Apabila tahun 2022 mulai ada tumbuh pekerja yang akan bekerja sebagai pekerja migran, belum tentu semua dapat diterima karena banyak usaha yang masih sedang tumbuh juga di tempat pekerja migran bekerja.

Berdasarkan hasil kajian dirumuskan kondisi pekerja di Kabupaten Buleleng adalah Penduduk Usia Kerja Tahun 2020

sejumlah 509.835. 251.751 orang atau 49,38 persen di antaranya merupakan penduduk laki-laki dan 50,62 persen sisanya merupakan penduduk perempuan yakni sejumlah 258.084 orang. Dibandingkan terhadap jumlah penduduk hasil Proyeksi Penduduk sejumlah 664 ribu jiwa, maka sekitar 76,78 persen penduduk berada pada kategori usia kerja. Pada periode 2019-2020 terjadi peningkatan persentase penduduk usia kerja 1,47 poin persen sedangkan pada periode sebelumnya 2018-2019 hanya sebesar 0,42 persen poin. Hal ini dimungkinkan karena adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada sektor pariwisata di Bali, khususnya wilayah Bali bagian selatan. Dampak buruk ini juga berimbas pada kembalinya pekerja asal Kabupaten Buleleng dari perantauan di Bali selatan ke kampung halaman. Tingkat Pendidikan pekerja di Kabupaten Buleleng pendidikan SD ke bawah yakni sebesar 44,37 persen, pendidikan SMP sederajat sebanyak 12,75 persen, pendidikan SMA umum sederajat, yakni sebanyak 21,89 persen, pendidikan tinggi (Diploma, S1,S2,S3) 20,99 persen. TPAK Kabupaten Buleleng tahun 2020 sebesar 75,07 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Buleleng, 75 orang tersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi. TPAK Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 69,67 persen pada tahun 2019 menjadi 75,07 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2019 pada posisi kedua dengan TPAK terkecil diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali. Tahun 2020, posisi Buleleng bergeser menjadi posisi keempat.

2. Kondisi Pengangguran di Kabupaten Buleleng

Tingkat pengangguran selalu menjadi topik ketika melakukan kajian ketenagakerjaan. Jumlah pengangguran menjadi indikator penting keberhasilan penyerapan tenaga kerja. Dalam dunia kerja, persaingan yang terjadi membuat lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat sepenuhnya menyerap seluruh tenaga kerja. Akibatnya, mereka yang tak mampu bersaing baik karena faktor kualitas sumber daya manusia maupun karena faktor keburuntungan dan lainnya akan menjadi penganggur karena tidak mendapat pekerjaan. Data terkait pengangguran yang diperlukan untuk kajian ini sebagian besar bersumber dari Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng tahun 2019 dan 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2019, sebanyak 32,32 persen dari penganggur di Kabupaten Buleleng berlatar belakang pendidikan SMA Kejuruan.

Sedangkan proporsi terbesar kedua adalah penduduk yang berlatar belakang SMA Umum yakni sebanyak 28,57 persen dari seluruh penganggur. Apabila ditelaah lebih lanjut terkait dengan proporsi jumlah angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Buleleng menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagaimana terlihat pada grafik 5.4, diantara para angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah, terdapat 0,87 persen saja yang menganggur sedangkan 99,13 persen sisanya bekerja. Kelompok angkatan kerja yang memiliki proporsi penganggur paling banyak adalah angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan Diploma

I/II/III, dimana 8 dari 100 orang angkatan kerja berpendidikan Diploma masih menganggur. Pada tahun 2020, sebanyak 33,59 persen dari penganggur di Kabupaten Buleleng berlatar belakang pendidikan SMA Umum. Sedangkan proporsi terbesar kedua adalah penduduk yang berlatar belakang SD kebawah sebanyak 24,67 persen dari seluruh penganggur.

Apabila ditelaah lebih lanjut terkait dengan proporsi jumlah angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Buleleng menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagaimana terlihat pada grafik 5.4, diantara para angkatan kerja yang berpendidikan SMP sederajat, terdapat 1,88 persen saja yang menganggur sedangkan 98,12 persen sisanya bekerja. Kelompok angkatan kerja yang memiliki proporsi penganggur paling banyak adalah angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan universitas, dimana 18 dari 100 orang angkatan kerja berpendidikan Diploma masih menganggur. Pada tahun 2019, hampir sepertiga dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Buleleng merupakan setengah penganggur karena jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, yakni sebanyak 33,00 persen dari seluruh pekerja. Jumlah ini tidak termasuk angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0 (nol) jam atau yang biasa disebut dengan sementara tidak bekerja. Untuk tahun 2020, hampir sepertiga dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Buleleng merupakan setengah penganggur karena jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, yakni sebanyak 42,75 persen dari seluruh pekerja. Jumlah ini tidak termasuk angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0 (nol) jam atau yang biasa disebut dengan sementara tidak bekerja. Tahun 2019, sebagian besar setengah penganggur di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 tergolong sebagai setengah penganggur sukarela (95,97 persen). Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2018 dimana hanya 77,18 persen dari para setengah penganggur yang masuk kategori setengah penganggur sukarela. Mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu namun tidak mencari pekerjaan lagi dan tidak pula bersedia menerima tawaran pekerjaan lain.

Untuk tahun 2020 tergolong sebagai setengah penganggur sukarela (81,10 persen). Angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana 95,97 persen penduduk bekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam di Kabupaten Buleleng termasuk kategori setengah penganggur sukarela. Mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu namun tidak mencari pekerjaan lagi dan tidak pula bersedia menerima tawaran pekerjaan lain. Tahun 2019, sebanyak 28,75 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang tergolong sebagai setengah penganggur di Kabupaten Buleleng tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Tak hanya yang berlatar belakang pendidikan rendah yang bisa menjadi setengah penganggur, di kalangan penduduk yang berpendidikan tinggi pun juga ada yang termasuk kategori setengah penganggur. Pada tahun 2019, sebanyak 6 orang dari 100 pekerja yang tergolong setengah penganggur

merupakan mereka yang berlatar belakang pendidikan diploma IV / Sarjana / Pascasarjana.

Tahun 2020, sebanyak 26,08 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong sebagai setengah penganggur di Kabupaten Buleleng tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Tak hanya yang berlatar belakang pendidikan rendah yang bisa menjadi setengah penganggur, di kalangan penduduk yang berpendidikan tinggi pun juga ada yang termasuk kategori setengah penganggur. Pada tahun 2020, sebanyak 8 orang dari 100 pekerja yang tergolong setengah penganggur merupakan mereka yang berlatar belakang pendidikan diploma IV / Sarjana / Pascasarjana.

Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka jumlah jam kerjanya cenderung lebih banyak. Karena pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka besar peluangnya untuk bekerja pada sektor formal, dimana pekerjaan pada sektor formal memiliki jadwal kerja teratur dan tetap. Berbeda dengan pekerjaan informal yang biasanya memiliki jam kerja yang fleksibel dan mudah berubah sesuai dengan kondisi pekerja. Di Buleleng tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.38 persen dimana jumlah penganggurannya adalah sebesar 20.230 jiwa. Tingginya jumlah pengangguran tersebut karena banyaknya pekerja yang diberhentikan kerja karena terjadinya pandemi Covid 19 mulai awal tahun 2020. Walaupun sebagian besar pekerja tersebut berusaha untuk menghidupi kebutuhan hidupnya, tetapi karena tidak mendapatkan hasil yang sesuai dan jam kerja di bawah 35 jam per minggu dapat dikatakan bahwa pekerja tersebut setengah menganggur. Semakin lama pandemi Covid 19 ini menyebabkan pihak yang tergolong setengah menganggur ini menjadi pengangguran sehingga di tahun 2021 Buleleng mencatatkan tingkat pengangguran 5.38 persen yang disebut sebagai pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran ini naik sekitar 4 persen dimana sebelum pandemi Covid 19 tingkat pengangguran hanya 1.2 persen. Artinya bahwa ada jumlah pengangguran atau orang yang tidak menghasilkan penghasilan cukup tinggi di Kabupaten Buleleng. Berbagai solusi memang sudah dilakukan untuk mengatasi pengangguran ini. Salah satunya melalui *job fair*. Namun, banyak perusahaan yang kondisi keuangannya belum stabil sehingga perekrutan atas karyawan baru belum dapat dilakukan secara maksimal. Salah satu cara adalah dengan menggunakan dana pemerintah untuk menggerakkan sektor-sektor padat karya yang bersinergi dengan sektor informal sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat yang berdampak kepada tumbuhnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian maka dapat dirumuskan beberapa hal terkait kondisi pengangguran di Bali yakni Dalam kurun waktu 2018-2020, tingkat pengangguran terus mengalami peningkatan dari 1,84 persen pada tahun 2018 menjadi 3,02 persen pada tahun 2019, hingga mencapai 5,19 persen pada tahun 2020. Pada periode 2018-2019, terjadi peningkatan sebesar 1,18 poin persen sedangkan pada periode 2019-2020, peningkatan angka pengangguran sebesar 2,17 persen

poin. Sebagian besar pengangguran berada pada kelompok umur 20-29 tahun yakni sebesar 49,10 persen dari seluruh penganggur. Kelompok terbanyak kedua adalah penganggur yang berada pada usia 30 – 39 tahun, yakni sebesar 20,67 persen. Sebagian besar penganggur berada pada kelompok umur muda dan produktif, dimana pada usia tersebut mayoritas orang sangat membutuhkan pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sedangkan menurut tingkat Pendidikan pengangguran di Kabupaten Buleleng dengan pendidikan SD kebawah yakni sebesar 24,67 persen, pendidikan SMA umum sederajat, yakni sebanyak 33,59 persen, pendidikan SMK 20,38 persen. Sisanya berpendidikan Pendidikan Tinggi.

3. Tingkat Efektivitas dan Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng Melalui Dinas Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid 19

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Terdapat banyak rumusan efektifitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992) dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Komaruddin (1994) mengungkapkan definisi efektifitas, efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pada dasarnya dalam memaknai efektifitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dalam penelitian ini perspektif responden dijabarkan ke dalam empat dimensi kualitas yaitu: (a) Bukti langsung (*tangible*) yaitu berupa bagaimana penampakan fisik berbagai kebijakan dan strategi yang telah dilakukan dipersepsikan relevan oleh responden diantaranya meliputi responden menyukai kegiatan yang dilakukan, acara dan materi yang diberikan menarik untuk diikuti, kegiatan dilakukan secara profesional, responden tidak merasa terpaksa mengikuti kegiatan.; (b) keandalan (*reability*) yaitu terkait dengan substansi kegiatan, kebijakan dan strategi yang telah dilakukan andal dalam menghadapi dampak pandemi diantaranya: materi/informasi sangat dibutuhkan, materi/informasi sesuai dengan kondisi dunia kerja saat ini di masa pandemi Covid 19, materi/informasi dapat mengembangkan kemampuan dalam bekerja di masa pandemi, materi yang disajikan sesuai dengan bakat dan kemampuan responden; (c) daya tanggap (*responsiveness*) yaitu kesediaan, kesiapan dan

kemampuan berbagai kebijakan/strategi dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan dimasa pandemi Covid 19 di antaranya materi/informasi/kebijakan dapat mempersiapkan peserta dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja di masa pandemi, dapat memberikan pengetahuan yang dibutuhkan di masa pandemi, mudah untuk diikuti, responden merasa bahwa layak untuk dilanjutkan di masa yang akan datang; (d) jaminan (*assurance*) menyangkut jaminan atas relevansi kebijakan/strategi yang telah dilakukan benar-benar bermanfaat di masa pandemi yang meliputi keterjaminan memberikan manfaat bagi peserta/masyarakat, jaminan memberikan manfaat di masa pandemi, dapat membantu responden untuk bertahan di masa pandemi, kegiatan yang dilakukan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten.

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi dimensi bukti langsung menunjukkan indeks sebesar 78 yang artinya kebijakan cukup efektif untuk dimensi bukti langsung (persepsi para responden menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja adalah efektif dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan akibat pandemi Covid 19). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya angka indeks efektivitas senilai 78 masih dalam kategori cukup efektif namun masih sangat jauh dari kategori sangat efektif. Dimensi ini sangat penting untuk dicermati lagi sebagai refleksi kebijakan dan strategi di masa yang akan datang terutama dalam bagaimana bukti langsung dari kebijakan/strategi yang dilakukan terfokus untuk meyakinkan masyarakat khususnya dalam hal bagaimana kegiatan yang dilakukan bisa disukai/diminati oleh peserta, acara dan materi yang diberikan menarik untuk diikuti, kegiatan dilakukan secara profesional serta masyarakat tidak merasa terpaksa mengikuti kegiatan.

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi dimensi keandalan menunjukkan indeks sebesar 82 yang artinya kebijakan efektif untuk dimensi keandalan (persepsi para responden menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja adalah efektif dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan akibat pandemi Covid 19). Walaupun termasuk dalam kategori efektif namun ada baiknya juga dijadikan sebagai bahan refleksi mengingat masih jauh dari kategori sangat sangat efektif. Perlu pemikiran dan upaya-upaya yang lebih serius lagi terutama terkait dengan substansi kegiatan, kebijakan dan strategi yang telah dilakukan andal dalam menghadapi dampak pandemi diantaranya: materi/informasi sangat dibutuhkan, materi/informasi sesuai dengan kondisi dunia kerja saat ini di masa pandemi Covid 19, materi/informasi dapat mengembangkan kemampuan dalam bekerja di masa pandemi, materi yang disajikan sesuai dengan bakat dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi dimensi keandalan menunjukkan indeks sebesar 85 yang artinya kebijakan efektif untuk dimensi daya tanggap (persepsi para responden menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten

Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja adalah efektif dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan akibat pandemi Covid 19). Pada dimensi ini memperoleh respon yang paling efektif dari responden. Sudah mendekati kriteria sangat efektif namun memang perlu juga dijadikan refleksi untuk peningkatan lebih baik lagi terutama terkait kesediaan, kesiapan dan kemampuan berbagai kebijakan/strategi dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan dimasa pandemi Covid 19 di antaranya materi/informasi/ kebijakan dapat mempersiapkan peserta dal;am menghadapi permasalahan tenaga kerja di masa pandemi, dapat memberikan pengetahuan yang dibutuhkan di masa pandemi, mudah untuk diikuti, responden merasa bahwa layak untuk dilanjutkan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi dimensi jaminan menunjukkan indeks sebesar 79 yang artinya kebijakan cukup efektif untuk dimensi jaminan (persepsi para responden menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja adalah cukup efektif dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan akibat pandemi Covid 19). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya angka indeks efektivitas senilai 79 masih dalam kategori cukup efektif namun masih sangat jauh dari kategori sangat efektif. Dimensi ini sangat penting untuk dicermati lagi sebagai refleksi kebijakan dan strategi di masa yang akan datang terutama dalam bagaimana menyangkut jaminan atas relevansi kebijakan/strategi yang telah dilakukan benar-benar bermanfaat di masa pandemi yang meliputi keterjaminan memberikan manfaat bagi peserta/masyarakat, jaminan memberikan manfaat di masa pandemi, dapat membantu responden untuk bertahan di masa pandemi, kegiatan yang dilakukan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten.

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan persepsi efektivitas secara keseluruhan menunjukkan indeks sebesar 81 yang artinya kebijakan efektif (persepsi para responden menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja adalah efektif dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan akibat pandemi Covid 19). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya angka indeks efektivitas senilai 81 termasuk dalam kategori efektif namun termasuk rentang yang paling rendah dalam kategori efektif, ini menunjukkan bahwa walaupun efektif namun perlu dijadikan bahan kajian untuk meningkatkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil, pembahasan dan FGD yang telah dilakukan maka dapat ditarik tiga kesimpulan yakni kondisi pekerja di Kabupaten Buleleng menunjukkan penduduk usia kerja tahun 2020 sejumlah 509.835. Sebanyak 251.751 orang atau 49,38 persen di antaranya merupakan penduduk laki-laki dan sebanyak 258.084 orang atau 50,62 persen merupakan penduduk perempuan. Dibandingkan terhadap jumlah penduduk sejumlah 664 ribu jiwa, maka sekitar 76,78 persen penduduk berada pada kategori usia kerja. Pada periode 2019-

2020 terjadi peningkatan persentase penduduk usia kerja 1,47 persen sedangkan pada periode sebelumnya 2018-2019 hanya sebesar 0,42 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada sektor pariwisata di Bali. Dampak buruk ini juga berimbas pada kembalinya pekerja asal Kabupaten Buleleng dari perantauan. Tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Buleleng di dominasi tingkat pendidikan SD ke bawah yakni sebesar 44,37 persen, pendidikan SMP sederajat sebanyak 12,75 persen, pendidikan SMA umum sederajat, yakni sebanyak 21,89 persen, pendidikan tinggi (Diploma, S1,S2,S3) 20,99 persen. TPAK Kabupaten Buleleng tahun 2020 sebesar 75,07. TPAK Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 69,67 pada tahun 2019 menjadi 75,07 pada tahun 2020. Pada tahun 2019 pada posisi kedua dengan TPAK terkecil diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali. Tahun 2020, posisi Buleleng bergeser menjadi posisi keempat.

Kesimpulan kedua dari kajian ini adalah kondisi pengangguran di Bali dalam kurun waktu 2018-2020, tingkat pengangguran terus mengalami peningkatan dari 1,84 persen pada tahun 2018 menjadi 3,02 persen pada tahun 2019, hingga mencapai 5,19 persen pada tahun 2020. Pada periode 2018-2019, terjadi peningkatan sebesar 1,18 poin persen sedangkan pada periode 2019-2020, peningkatan angka pengangguran sebesar 2,17 persen. Sebagian besar pengangguran berada pada kelompok umur 20-29 tahun yakni sebesar 49,10 persen. Kelompok terbanyak kedua adalah penganggur yang berada pada usia 30 - 39 tahun sebesar 20,67 persen. Sebagian besar penganggur berada pada kelompok umur muda dan produktif. Sedangkan menurut tingkat pendidikan pengangguran di Kabupaten Buleleng dengan pendidikan SD ke bawah yakni sebesar 24,67 persen, pendidikan SMA umum sederajat, yakni sebanyak 33,59 persen, pendidikan SMK 20,38 persen. Sisanya berpendidikan pendidikan tinggi.

Kesimpulan ketiga dari kajian ini adalah tingkat efektifitas kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja adalah efektif di masa pandemi dan endemi Covid 19. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei yang menghasilkan perhitungan indeks efektifitas senilai 81 berada pada rentang nilai 80 - 89 yang termasuk kategori efektif. Penilaian tingkat efektifitas ini dijabarkan kedalam empat dimensi kualitas yaitu: (a) Bukti langsung (*tangible*) dengan tingkat efektifitas pada kategori cukup efektif (b) keandalan (*reability*) dengan tingkat efektifitas pada kategori efektif (c) daya tanggap (*responsiveness*) dengan tingkat efektifitas pada kategori efektif (d) jaminan (*assurance*) dengan tingkat efektifitas pada kategori cukup efektif.

Berdasarkan hasil kajian, pembahasan dan FGD yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah profil tenaga kerja dan pengangguran di Kabupaten Buleleng terkonsentrasi (jumlahnya melebihi 70%) tingkat Pendidikan sebagian besar SD s/d SMA sederajat dan pada kelompok umur produktif/ muda. Disisi lain yakni sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali sangat rentan akan berbagai peristiwa sehingga

perlu penyiapan lapangan kerja, kebijakan, strategi rasional dan relevan dengan kondisi tersebut seperti: (a) Optimalisasi potensi lokal Kabupaten Buleleng untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja lokal. Menumbuhkan keyakinan potensial sumber ekonomi di luar pariwisata seperti pertanian, peternakan, Perikanan serta potensi lainnya. Mengurangi ketergantungan tenaga kerja pada sektor pariwisata serta mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal. (b) Pemerintah melalui dinas terkait perlu meningkatkan kegiatan, kebijakan dan strategi untuk dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dengan lebih mengutamakan penggalan potensi daerah. (c) Mengintensifkan potensi UMKM di Buleleng untuk tenaga kerja lokal supaya potensi ketenagakerjaan di sektor ini tidak banyak direbut oleh tenaga kerja luar Buleleng. Rekomendasi kedua adalah berbagai kegiatan/kebijakan/ strategi yang dilakukan dinas ketenagakerjaan sudah efektif namun perlu ditingkatkan kearah sangat efektif, kondisi ini dikarenakan sebenarnya angka indeks efektivitas senilai 81 termasuk dalam kategori efektif namun termasuk rentang yang paling rendah dalam kategori efektif. Perlu dijadikan bahan kajian untuk meningkatkan kebijakan dan stsrategi di masa yang akan datang terutama keyakinan akan dimensi efektivitas bukti langsung terkait materi serta profesionalisme penyelenggaraan dan dimensi efektivitas jaminan akan kebermanfaatan kebijakan dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan di masa ketidakpastian (pandemi Covid 19). Rekomendasi ketiga adalah kebijakan terkait jaminan Ketenagakerjaan (TK dan kesehatan) sebenarnya sudah efektif hanya perlu penyempurnaan regulasi untuk memaksimalkan peran di masa yg akan datang. Rekomendasi keempat adalah komunikasi efektif dimasa ketidakpastian sangat diperlukan, disarankan untuk menyiapkan/ menyempurnakan pola komunikasi efektif yang dapat menjembatani berbagai informasi yang dibutuhkan berbagai pihak baik pemerintah, pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat umum. Ketepatan informasi yang dapat diserap publik akan dapat meredam dan meminimalkan dampak negatif dari kondisi ketidakpastian (seperti pandemi Covid 19). Rekomendasi kelima adalah pendataan ketenagakerjaan supaya valid, masing-masing pihak terkait bisa menggunakan data awal dari sumber yang sama. Sinergi dari berbagai pihak khususnya Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Institusi lainnya harus dioptimalkan dengan keterkaitan bersama Badan Pusat Statistik. Pemanfaatan kemajuan teknologi khusus sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghasilkan kependudukan khusus data ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Abdul R Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan, Indeks*, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

- Agus Midah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: Ghalia Indonesia
- Agus Santoso, 2012, Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Aloysius Uwiyono, dkk. 2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Fariana, 2012, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Asri Wijayanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2020, Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng 2020, BPS Kabupaten Buleleng
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2020, Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng 2020, BPS Kabupaten Buleleng
- Bernard L. Tanya, dkk., 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya
- Boedhi Wijardjo, 2001, Konflik Bahaya atau Peluang, Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam, BPKPA dengan BSP Kemala, Bandung
- Darwin Prinst. 2000. Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia. Bandung: PT. Citra
- Dwiyanto Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H. Salim HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hilaire McCoubrey and Nigel D White, 1999, Text Book on Jurisprudence, third edition, Blackstone Press Limited, London
- Ian Ward, Pengantar Teori Hukum Kritis, 2014, diterjemahkan dari karya Ian Ward, An Introduction to Ctrical Legal Theory, Nusa Media, Bandung
- Juanda Pangaribuan. 2005. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta
- Lalu Husni. 2005. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Libertus Jehani, 2006, HakHak Pekerja Bila di PHK, Visi Media, Jakarta
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006)
- N. Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi*. Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2003)
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Piu Partanto, 2001, Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola

- Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Citra
- Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. (Vol 17 no 6)

